



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp2.874.247.890.000,00 bertambah sejumlah Rp76.575.352.000,00 sehingga menjadi Rp2.950.823.242.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 2.670.497.687.000,00
b. Bertambah	Rp 205.280.119.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp 2.875.777.806.000,00</u>
2. Belanja	
a. Semula	Rp 2.874.247.890.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 76.575.352.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 2.950.823.242.000,00
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 75.045.436.000,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1). Semula	Rp 212.250.203.000,00
2). (Berkurang)	<u>(Rp 119.690.767.000,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 92.559.436.000,00
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp 8.500.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 9.014.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp 17.514.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp 75.045.436.000,00</u>
setelah Perubahan	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
setelah Perubahan	Rp -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1). Semula Rp 373.410.356.000,00
 - 2). Bertambah Rp 137.437.908.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp 510.848.264.000,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp 1.786.019.056.000,00
2). (Berkurang) (Rp 1.520.115.000,00)

Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp 1.784.498.941.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). Semula Rp 511.068.275.000,00
2). Bertambah Rp 69.362.326.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah
setelah Perubahan Rp 580.430.601.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 62.048.770.000,00
2). Bertambah Rp 14.521.370.000,00

Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan Rp 76.570.140.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp 15.720.468.000,00
2). (Berkurang) (Rp 685.096.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan Rp 15.035.372.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1). Semula Rp 4.230.732.000,00
2). Bertambah Rp 11.078.268.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 15.309.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1). Semula Rp 291.410.386.000,00
2). Bertambah Rp 112.523.366.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah Perubahan Rp 403.933.752.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
1). Semula	Rp	40.263.233.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	1.468.890.000,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	38.794.343.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp	1.339.381.605.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	22.319.801.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	1.317.061.804.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp	406.374.218.000,00
2). Bertambah	Rp	22.268.576.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	428.642.794.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	5.455.452.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah		<hr/>
setelah Perubahan	Rp.	5.455.452.000,00
b. Dana Darurat		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pendapatan Dana Darurat		<hr/>
setelah Perubahan	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp	197.586.420.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	11.475.316.000,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah		<hr/>
Lainnya setelah Perubahan	Rp	186.111.104.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1). Semula	Rp	42.559.517.000,00
2). Bertambah	Rp	-

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	42.559.517.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	75.382.190.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	75.382.190.000,00
f. Dana Desa		
1). Semula	Rp	270.922.338.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Dana Desa setelah Perubahan	Rp	270.922.338.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1). Semula	Rp	1.749.236.271.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	175.206.590.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	1.574.029.681.000,00
b. Belanja Langsung		
1). Semula	Rp	1.125.011.619.000,00
2). Bertambah	Rp	251.781.942.000,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	1.376.793.561.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp	1.173.864.400.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	105.478.992.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	1.068.385.408.000,00
b. Belanja Bunga		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			<hr/>
	Rp	-	
c. Belanja Subsidi			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			<hr/>
	Rp	-	
d. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp	36.038.700.000,00	
2). (Berkurang)	(Rp	7.611.000.000,00)	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			<hr/>
	Rp	28.427.700.000,00	
e. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp	35.699.850.000,00	
2). (Berkurang)	(Rp	14.277.976.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			<hr/>
	Rp	21.421.874.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1). Semula	Rp	8.093.052.000,00	
2). Bertambah	Rp	3.199.028.000,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan			<hr/>
	Rp	11.292.080.000,00	
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1). Semula	Rp	490.540.269.000,00	
2). (Berkurang)	(Rp	51.037.650.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan			<hr/>
	Rp	439.502.619.000,00	
h. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	-	
Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan			<hr/>
	Rp	5.000.000.000,00	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp 37.279.803.000,00

2). Bertambah Rp 36.874.615.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp 74.154.418.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula Rp 561.328.584.000,00

2). Bertambah Rp 71.162.864.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp 632.491.448.000,00

c. Belanja Modal

1). Semula Rp 526.403.232.000,00

2). Bertambah Rp 143.744.463.000,00

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp 670.147.695.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1). Semula Rp 212.250.203.000,00

2). (Berkurang) (Rp 119.690.767.000,00)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 92.559.436.000,00

b. Pengeluaran

1). Semula Rp 8.500.000.000,00

2). Bertambah Rp 9.014.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 17.514.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1). Semula Rp 212.150.203.000,00

2). (Berkurang) (Rp 119.620.767.000,00)

Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 92.529.436.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1). Semula Rp -

2). Bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah Perubahan	Rp	-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	<hr/>	
	Rp	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	<hr/>	
	Rp	-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1). Semula	Rp	100.000.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	70.000.000,00)
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	<hr/>	
	Rp	30.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	<hr/>	
	Rp	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	<hr/>	
	Rp	-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1). Semula	Rp	8.500.000.000,00
2). Bertambah	Rp	9.014.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	<hr/>	
	Rp	17.514.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	<hr/>	
	Rp	-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	<hr/>	
setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal

BUPATI BREBES,

T T D

IDZA PRIYANTI

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH : 8/2017